

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 23/KEP/DPRD/XI/2017**

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, disusun oleh DPRD dan Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan berdasarkan hasil koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada hari Jum'at, tanggal 24 Nopember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Nopember 2017**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,**

ttd

SUJANARKO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 23/K/DPRD/XI/2017

TANGGAL : 29 Nopember 2017

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JUDUL RAPERDA	POKOK MATERI	KETERANGAN
1	Perparkiran	Mengubah substansi materi pada Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dengan menggolongkan kawasan parkir dari 2 kawasan menjadi 3 kawasan dengan menambahkan kawasan wisata	Raperda Lanjutan Tahun 2017
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Raperda Lanjutan Tahun 2017
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Raperda Lanjutan Tahun 2017
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Raperda Lanjutan Tahun 2017
5	Retribusi Pelayanan Jasa Tera/Tera Ulang	Tindaklanjut pelimpahan kewenangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Raperda Lanjutan Tahun 2017
6	Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang	Tindaklanjut pelimpahan kewenangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Raperda Lanjutan Tahun 2017
7	Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Adminduk	Mengubah Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Raperda Lanjutan Tahun 2017
8	Penyelenggaraan Transportasi	Penataan transportasi yang saling terintegrasi agar tercipta Yogyakarta yang berhati nyaman	Raperda Lanjutan Tahun 2017

NO.	JUDUL RAPERDA	POKOK MATERI	KETERANGAN
9.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	Penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Raperda Lanjutan Tahun 2017
10	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	guna mewujudkan Kota Yogyakarta Berhati Nyaman dan menumbuhkan sikap dan perilaku tertib bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Raperda Lanjutan Tahun 2017
11	Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan	dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Kota Yogyakarta	Raperda Lanjutan Tahun 2017
12	Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Dissabilitas	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	Raperda Lanjutan Tahun 2017
13	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah	Memberikan penyertaan modal pada PDAM dan BPD DIY	Raperda Inisiatif Walikota
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Raperda Inisiatif Walikota
15	Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Merubah substansi materi dari Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Raperda Inisiatif Walikota

NO.	JUDUL RAPERDA	POKOK MATERI	KETERANGAN
16	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Menindaklanjuti Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Raperda Inisiatif Walikota
17	Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah	Amanat Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pendapatan lain-lain PAD yang sah harus ditetapkan dengan Perda	Raperda Inisiatif Walikota
18.	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Substansi materinya berisi mengenai kemudahan dalam pelayanan kepada Wajib Pajak	Raperda Inisiatif Walikota
19	Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	Menindaklanjuti UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	Raperda Inisiatif Walikota
20	Penyelenggaraan Pemakaman	Mengganti Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Yogyakarta	Raperda Inisiatif Walikota
21	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Memasukkan Substansi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan (Kemantren); b. Pembentukan Susunan Badan Kesatuan Bangsa; c. Pembentukan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah d. Pembentukan Susunan Dinas Pengelolaan Pasar; e. Pembentukan Susunan Dinas Pengelolaan Taman Pintar; f. Pembentukan Susunan Rumah Sakit Umum Daerah. 	Raperda Inisiatif Walikota

NO.	JUDUL RAPERDA	POKOK MATERI	KETERANGAN
22	Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan	Tindak lanjut Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penghentian Penyelenggaraan Pelayanan Izin Gangguan dan Surat Edaran Gubernur Nomor 4/se/IV/2017 tentang Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan	Raperda Inisiatif Walikota
23	Pengawasan Kualitas Air Minum	Mengatur mengenai penyelenggaraan pengawasan kualitas air minum	Raperda Inisiatif Walikota
24	Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Mewujudkan hak konstitusional setiap warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum	Inisiatif DPRD
25	Kemitraan Ekonomi Kerakyatan (UMKM dan Koperasi) berserta Pengembangannya	Merumuskan arah pembangunan system pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan yang berkelanjutan terhadap UMKM dan Koperasi di Daerah	Inisiatif DPRD
26	Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Menjadi acuan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas perumahan sehingga dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum	Inisiatif DPRD
27	Ketahanan Keluarga	Harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat , serta dunia usaha	Inisiatif DPRD

NO.	JUDUL RAPERDA	POKOK MATERI	KETERANGAN
28	Penyelenggaraan Perpustakaan Kota Yogyakarta	Meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan perpustakaan yang terintegrasi dan berkesinambungan	Inisiatif DPRD
29	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017		
30	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018		
31	APBD Tahun Anggaran 2019		

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
KETUA,**

ttd

SUJANARKO